



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN SIANTAN TENGAH

Jalan Haji Ali, Air Asuk, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau 29791,
Pos-el kecamatanSIANTANTENGAH7@gmail.com

Air Asuk, 12 September 2025

Yth. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas
di -
Tarempa

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 02/ Prog.KST.050/11.2025

No	URAIAN	Banyaknya	Keterangan
1	Dokumen Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2025/209	1 (satu) Berkas	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Diterima Pada Tanggal

Yang menerima:

.....
NIP..



AFRIZAL, S.Pd

Penata Tk. I / III.d

NIP. 19680217 199303 1 005



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SIANTAN TENGAH

Tahun

2025 - 2029



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud Dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2 Daya Aparatur	11
2.3 Kinerja Pelayanan	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	19
2.5 Penentuan Isu-isu Strategis	20
2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21
2.7 Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	25
2.8 Renstra K/L dan Renstra	26
2.9 Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	29
2.10 Penentuan Isu-isu Strategis	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	34
3.1 Tujuan dan Sasaran.....	34
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	36
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN SERTA	
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.	38
4.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	38
BAB V PENUTUP	48



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan	11
Tabel 2.2	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan ...	12
Tabel 2.3	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kelamin	12
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana Pendukung	14
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas	16
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	18
Tabel 2.7	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	24
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Siantan Tengah	35
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	37
Tabel 4.3	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Siantan Tengah	40
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Tengah	46
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran	47
Gambar 2. 1	Struktur Organisasi Kecamatan Siantan tengah Kabupaten Kepulauan Anambas	10



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan Siantan Tengah, sebagai salah satu wilayah administratif di Kabupaten Kepulauan Anambas, memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan potensi alam yang melimpah, keberagaman budaya, serta posisi geografis yang menguntungkan, kecamatan ini menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Dalam rangka menjawab dinamika yang berkembang, penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2025-2029 menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan arah pembangunan yang terencana, terukur, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan dokumen ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan kecamatan, yang mencakup perumusan kebijakan, pelayanan publik, serta koordinasi pembangunan. Sebagai salah satu elemen pemerintah daerah, Kecamatan Siantan Tengah juga dituntut untuk selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas 2025- 2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dengan demikian, Renstra ini berfungsi sebagai dokumen operasional yang menjembatani visi pembangunan daerah dengan pelaksanaan program kerja di tingkat kecamatan.

Kondisi geografis Kecamatan Siantan Tengah, yang terdiri dari wilayah kepulauan dengan berbagai karakteristik unik, menjadi tantangan tersendiri dalam merencanakan pembangunan. Aksesibilitas antarwilayah, keterbatasan infrastruktur, serta risiko bencana alam seperti badai dan abrasi pantai merupakan isu

strategis yang perlu dikelola dengan baik. Di sisi lain, potensi



sumber daya kelautan, pariwisata, serta budaya lokal memberikan peluang besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat apabila dikelola secara optimal dan berkelanjutan.

Dalam merumuskan Renstra ini, pendekatan partisipatif menjadi prinsip utama, melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan ini mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, sekaligus menciptakan rasa memiliki terhadap program-program yang dirancang. Proses partisipasi ini juga sejalan dengan semangat desentralisasi, di mana pembangunan harus berakar pada aspirasi dan potensi lokal.

Selain itu, dokumen ini dirancang dengan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, seperti Sustainable Development Goals (SDGs), yang menjadi kerangka kerja global dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Integrasi ini diharapkan mampu menjadikan Kecamatan Siantan Tengah sebagai wilayah yang adaptif terhadap perubahan global, sekaligus menjaga identitas lokal sebagai basis kekuatan pembangunan. Pendekatan ini juga mencakup penguatan kapasitas pemerintahan kecamatan untuk lebih efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan dan fasilitasi pembangunan.

Renstra Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh dalam menghadapi tantangan pembangunan lima tahun ke depan. Dokumen ini tidak hanya memuat rencana aksi strategis, tetapi juga menjadi alat monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sinergi, komitmen, dan kerja sama seluruh pihak sangat diperlukan untuk merealisasikan visi pembangunan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan di Kecamatan Siantan Tengah.



1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Siantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gender Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor



- 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerahl
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang



- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas No 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 100);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan. Dokumen ini dirancang untuk mengintegrasikan visi, misi, dan program prioritas pembangunan kecamatan dengan kebijakan strategis yang telah ditetapkan di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Dengan adanya Renstra ini, diharapkan seluruh aktivitas pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Siantan Tengah dapat berjalan secara terarah, efisien, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta potensi lokal yang dimiliki.

Selain itu, maksud penyusunan dokumen ini adalah untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam merancang dan melaksanakan program-program pembangunan. Renstra ini menjadi acuan utama bagi seluruh perangkat kecamatan dalam menjalankan tanggung jawabnya, serta menjadi alat pengendali untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.



b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen rencana strategis yang komprehensif dan berorientasi pada hasil, guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan kecamatan.
2. Mengidentifikasi isu-isu strategis yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Siantan Tengah.
3. Merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi Kecamatan Siantan Tengah secara terukur dan realistis.
4. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di wilayah kecamatan.
5. Menjadi alat monitoring dan evaluasi bagi pemerintah kecamatan dalam memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN,PERMASALAHAN,DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini memuat struktur organisasi Kecamatan Siantan Tengah , capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Siantan Tengah periode sebelumnya dan



menjelaskan hambatan-hambatan yang masih dihadapi dan perlu solusi pemecahan permasalahan Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan strategis berdasarkan tugas dan fungsi dari Kecamatan Siantan Tengah telaah dan rumusan isu – isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran organisasi Kecamatan Siantan Tengah. Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah di tetapkan pada akhir periode perencanaan.

BAB VI RENCANA PROGRAM,KEGIATAN DAN PENDANAAN SERTA KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapain tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP



**BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas serta Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Siantan Tengah memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan.

Kecamatan memiliki tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Siantan Tengah menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan;



- h. pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti diuraikan diatas, bentuk Susunan Organisasi Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari :

1. Camat

Pimpinan kecamatan yang bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Membantu camat dalam koordinasi administrasi, yang terdiri dari:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Perencanaan

3. Seksi-seksi Teknis

Melaksanakan tugas-tugas teknis kecamatan, yang meliputi:

- Seksi Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Seksi Pelayanan Umum

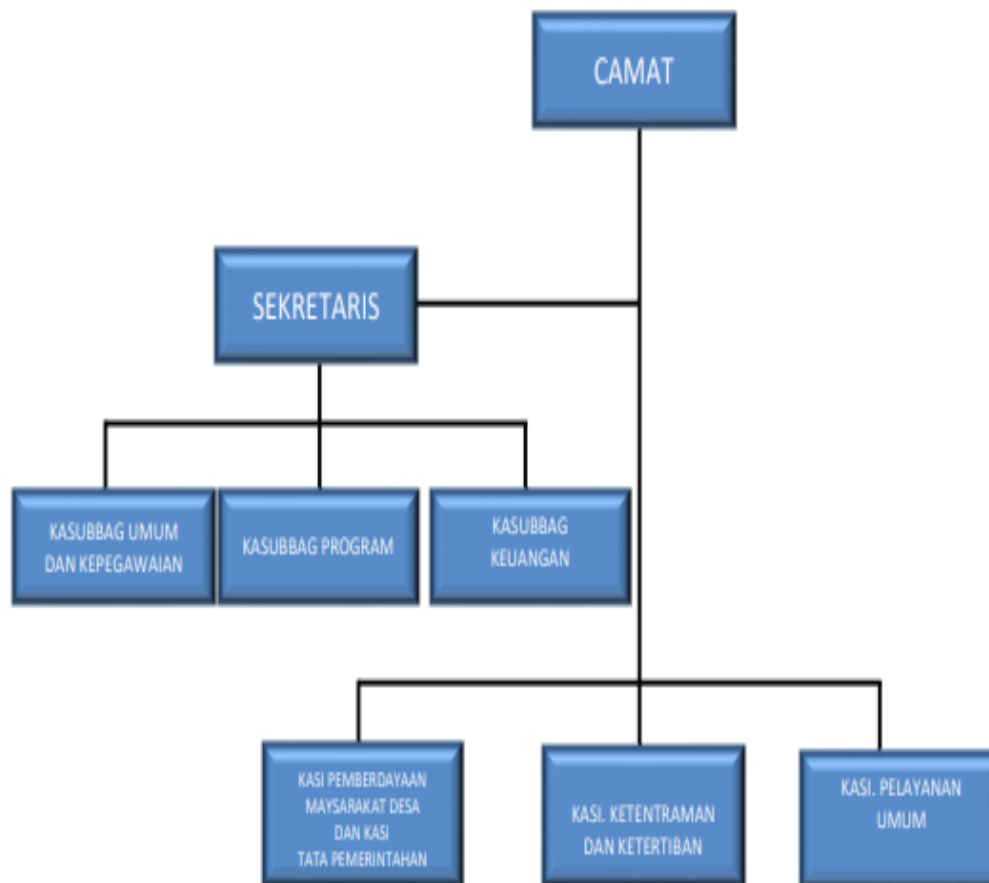
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Mendukung pelaksanaan tugas tertentu berdasarkan keahlian dan kompetensi masing-masing.

Struktur Organisasi Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.



Gambar 2. 1
Struktur Organisasi Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten
Kepulauan Anambas





2.2 Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Kecamatan Siantan Tengah Per Januari 2025 berjumlah 26 (DUA Puluh Enam) orang terdiri dari 11 Pegawai Negeri Sipil dan 15 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Selanjutnya sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi pegawai sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Aparatur berdasar kualifikasi golongan dan jabatan

Adapun komposisi Pegawai Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2025/2029 berdasarkan Kualifikasi golongan dan jabatan sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Sumber Daya Aparatur
Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan

Golongan	Jabatan	Jumlah
Pembina	Eselon III.a	0 Orang
Penata	Eselon III.b	0 Orang
Penata Tk. I	Eselon IV.a	5 Orang
Penata	Eselon IV.a	3 Orang
Penata Muda Tingkat I	Eselon IV.b	1 Orang
Penata Muda	Eselon IV.b	2 Orang
Penata Muda	Staf	0 Orang
Pengatur Tingkat I	Staf	0 Orang
Pengatur	Staf	0 Orang
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Staf	37 Orang
Jumlah		48 Orang



b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan

Adapun komposisi pegawai Kecamatan Siantan Tengah tahun 2025/2029 dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Sumber daya aparatur	Kualifikasi Pendidikan
1	ASN : 11 Orang	S2 : 0 Orang
		S1 : 9 Orang
		D3 : 2 Orang
		D2 : 0 Orang
		SMA/SMK : 0 Orang
		SMP/SLTP : 2 Orang
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja: 37 Orang	S1 : 12 Orang
		D3 : 0 Orang
		SMA/SMK : 24 Orang
		SMA/SMK : 1 Orang
Jumlah		48 Orang

c. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber Daya Aparatur berdasarkan kelamin yang ada pada kantor Kecamatan Siantan Tengah didominasi kaum perempuan yang terdiri dari ASN dan tenaga honor, berikut ini sumber daya aparatur ASN dan tenaga honor berdasar kelamin.

Tabel 2.3
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber daya aparatur	Laki-Laki	Perempuan
ASN/PNS	7	4
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	17	20
Jumlah	24	24



Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat kecamatan memegang peran strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan masyarakat. Sebagai ujung tombak birokrasi, ASN di kecamatan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program-program pembangunan yang dirumuskan pemerintah dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pelayanan administratif, hingga pengawasan atas program-program yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Di tingkat kecamatan, ASN juga menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat. Mereka berfungsi sebagai mediator yang menerjemahkan kebijakan-kebijakan makro pemerintah daerah ke dalam aksi nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam menjalankan tugas ini, ASN dituntut untuk memiliki kompetensi, integritas, dan dedikasi yang tinggi, karena keberhasilan pembangunan di tingkat kecamatan sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat lokal. Selain itu, ASN berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan, sehingga menciptakan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Lebih dari itu, ASN di kecamatan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pelayanan yang responsif, transparan, dan akuntabel menjadi kunci utama dalam membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan warga. Dengan peran ini, ASN tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan dan inovasi di tingkat lokal. Dengan demikian, peran ASN di kecamatan tidak hanya penting bagi keberhasilan pembangunan di wilayahnya, tetapi juga menjadi cerminan keberhasilan pemerintahan daerah secara keseluruhan.



Tabel 2. 4
Sarana dan Prasarana Pendukung

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Printer	3 Unit	2016
2	Genset	1 Unit	2017
3	Tenda	2 Unit	2017
4	Lap Top	3 Unit	2018
5	Printer	5 Unit	2018
6	Proyektor + Attachment	1 Unit	2018
7	Mesin pemotong Rumput	4 Buah	2019
8	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1 Buah	2019
9	Genset	1 Unit	2020
10	Tandon Air	20 Buah	2020
11	Sepeda Motor	3 Unit	2021
12	Lemari Es	1 Unit	2021
13	AC	4 Unit	2021
14	Kursi Kerja Pejabat	6 Unit	2021
15	Tangga Aluminium	2 Buah	2022
16	PC	9 Unit	2023
17	Laptop	1 Unit	2023
18	Printer	10 Unit	2023
19	Meja Kerja Kayu	6 Buah	2024

2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan di tingkat kecamatan merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, kecamatan memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan yang cepat, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pelayanan administratif, seperti pengurusan dokumen kependudukan, perizinan, dan fasilitasi program pembangunan, harus dilakukan secara profesional dengan mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas.



Peningkatan kinerja pelayanan tidak hanya bertumpu pada pemenuhan standar prosedur, tetapi juga pada kemampuan ASN untuk memahami dan merespons kebutuhan masyarakat secara proaktif.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, kecamatan terus mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi pelayanan. Digitalisasi proses pelayanan, seperti penerapan sistem antrian online dan penyediaan layanan berbasis aplikasi, diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat sekaligus mempercepat proses administrasi. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi menjadi prioritas untuk memastikan pelayanan yang berkualitas dan berkeadilan. Dengan kinerja pelayanan yang optimal, kecamatan dapat berkontribusi langsung pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendukung tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Berikut disampaikan hasil capaian kinerja pelayanan pada periode 2021-2026, yaitu;



Tabel 2.5 (Tabel T-C. 23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	CC (51,76)	B (60,1)	B (63,00)	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)	CC (51,76)	B (60,1)	B (63,00)	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)	CC (51,76)	B (60,1)	B (63,00)	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	B (81,29)	B (82,00)	A (84,00)	A (86,00)	A (88,00)	A (89,00)	B (81,29)	B (82,00)	A (84,00)	A (86,00)	A (88,00)	A (89,00)	B (81,29)	B (82,00)	A (84,00)	A (86,00)	A (88,00)	A (89,00)
3	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	-	-	-	17%	33%	50%	67%	83%	100%	17%	33%	50%	67%	83%	100%	17%	33%	50%	67%	83%	100%
4	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Kinerja pelayanan Kecamatan Siantan Tengah selama periode 2021-2026 menjadi pijakan penting dalam merumuskan perencanaan strategis untuk periode berikutnya. Selama lima tahun terakhir, berbagai program dan inisiatif telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik melalui penyederhanaan prosedur administrasi, penerapan teknologi informasi, maupun penguatan kapasitas sumber daya manusia. Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, tingkat partisipasi masyarakat yang belum optimal, serta kebutuhan akan inovasi pelayanan yang lebih adaptif masih menjadi isu yang harus ditindaklanjuti. Evaluasi terhadap capaian dan kendala ini memberikan gambaran yang jelas mengenai aspek-aspek yang perlu diperkuat untuk memastikan pelayanan yang lebih efektif di masa depan.

Melalui evaluasi kinerja ini, Kecamatan Siantan Tengah dapat mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan dalam sistem pelayanan yang telah berjalan. Temuan dari periode sebelumnya menjadi bahan refleksi untuk menyusun strategi pelayanan yang lebih inovatif dan inklusif di periode 2025-2029. Fokus pada peningkatan aksesibilitas, efektivitas, dan transparansi pelayanan menjadi kunci dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Dengan demikian, hasil evaluasi kinerja pelayanan 2021-2026 tidak hanya menjadi catatan retrospektif, tetapi juga sebagai dasar untuk merancang langkah-langkah strategis yang mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang unggul, responsif, dan berdaya saing ke depan.

Selanjutnya disajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Siantan Tengah, yaitu:



Tabel 2.6 (Tabel T-C. 23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2021-2026

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4,226,424,137	3,054,167,543	3,298,717,185	3,102,425,024	3,262,484,082	3,785,022,134	2,933,095,982	2,055,479,425	3,172,243,419	2,033.989.267	0	0	82.27	73.73	96.17	65.56	0	0		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	741,633,000	0	0	0	21,050,000	-	4,095,000	0	0	0	0	0	14.44	0	0	0	0	0		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	176,216,000	0	0	118,611,175	340,225,000	110,574,206	157,621,900	0	0	118.268.00	0	0	89.45	0	0	99.71	0	0		
Program koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	7,055,000	0	64,215,400	32,032,400	12,252,000	13,800,000	4,235,000	0	59,105,000	29.852.000	0	0	60.03	0	92.04	93.19	0	0		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	26,215,000	16,800,000	57,193,000	49,440,000	113,913,282	83,103,221	18,772,000	4,950,000	54,655,800	48.252.000	0	0	88.57	31.25	95.56	97.6	0	0		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11,385,000	35,780,000	69,003,500	10,350,000	64,388,950	6,900,000	1,986,500	15,750,000	17,507,000	10.350.000	0	0	44.49	74.96	25.37	100	0	0		



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Tantangan

a. Kondisi Internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal adalah :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Tidak semua ASN memiliki kompetensi yang memadai dalam memberikan pelayanan berbasis teknologi dan inovasi. Hal ini menghambat efektivitas pelayanan yang optimal.

2. Fasilitas pendukung yang belum memadai

Sarana dan prasarana pelayanan, seperti infrastruktur kantor, jaringan internet, dan alat pendukung, masih terbatas, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.

3. Pengelolaan Administrasi yang belum optimal

Prosedur administratif yang belum sepenuhnya terstandarisasi sering menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan yang cepat dan efisien.

b. Kondisi Eksternal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal adalah :

1. Letak wilayah Kecamatan Siantan Tengah yang terdiri dari daerah kepulauan menyebabkan beberapa layanan sulit dijangkau oleh masyarakat, terutama di wilayah terpencil.

2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan publik masih belum optimal, yang terkadang disebabkan oleh kurangnya informasi atau kesadaran akan pentingnya pelayanan.

3. Perubahan kebijakan atau regulasi dari tingkat pusat maupun daerah sering kali memengaruhi kelancaran implementasi pelayanan di tingkat kecamatan.



2. Peluang

Adapun peluang yang mendukung yang berkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Siantan Tengah dalam lima tahun ke depan adalah :

1. Pemanfaatan teknologi digital memberikan peluang besar untuk mempercepat dan menyederhanakan proses pelayanan, seperti melalui aplikasi layanan online atau sistem manajemen berbasis elektronik.
2. Adanya arahan nasional tentang reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi dasar yang kuat untuk mengembangkan pelayanan di tingkat kecamatan.
3. Kecamatan Siantan Tengah memiliki potensi masyarakat yang berdaya saing, terutama generasi muda yang adaptif terhadap teknologi, yang dapat didayagunakan untuk mendukung program pelayanan berbasis komunitas.
4. Peluang kemitraan dengan pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan inovasi pelayanan serta memperkuat kapasitas SDM dan infrastruktur.

2.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagai salah satu unit kerja di tingkat wilayah, Kecamatan Siantan Tengah memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Dalam menjalankan tugasnya, kecamatan bertanggung jawab atas implementasi kebijakan yang dilimpahkan oleh Bupati serta memastikan keterpaduan program pembangunan di wilayahnya. Dengan beragam fungsi yang mencakup pengelolaan administrasi, pemberdayaan masyarakat, hingga pembinaan di bidang sosial, ekonomi, dan ketertiban, Kecamatan Siantan Tengah diharapkan mampu menjadi katalisator bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat



berbagai tantangan yang memerlukan identifikasi untuk menyusun langkah perbaikan ke depan. Permasalahan yang ada

seringkali menjadi hambatan dalam mencapai kinerja pelayanan yang optimal dan keberhasilan program pembangunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi secara mendalam untuk memahami permasalahan yang muncul dan isu strategis yang perlu ditangani.

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Siantan Tengah tidak hanya mencakup aspek internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, tetapi juga aspek eksternal seperti dampak perubahan iklim, tingkat partisipasi masyarakat, serta persaingan antardaerah dalam menarik perhatian pemerintah pusat dan daerah. Dengan memahami permasalahan dan isu strategis ini, Kecamatan Kecamatan Siantan Tengah dapat merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi kendala sekaligus memanfaatkan peluang yang ada guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung keberhasilan pembangunan di wilayahnya, Kecamatan Siantan Tengah perlu memahami secara mendalam berbagai permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Identifikasi permasalahan menjadi langkah penting dalam merumuskan kebijakan strategis yang tepat sasaran. Dengan memahami kendala yang muncul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan, solusi yang diusulkan dapat dirancang secara lebih spesifik dan aplikatif. Berikut adalah identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Siantan Tengah sebagai berikut:

1 Penyusunan Program dan Kegiatan Kecamatan

- Kurangnya data yang akurat dan terkini untuk mendukung perencanaan program dan kegiatan.



- Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam analisis dan penyusunan perencanaan berbasis data.
- 2 Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan
- Belum optimalnya sinergi antara pemerintah kecamatan dengan perangkat desa dan kelurahan.
 - Kurangnya mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap pelaksanaan program di tingkat desa/kelurahan.
- 3 Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa
- Minimnya program yang berorientasi pada penguatan wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda.
 - Keterbatasan anggaran dan fasilitas untuk mendukung kegiatan pembinaan ideologi secara berkelanjutan.
- 4 Pengkoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan akibat kurangnya sosialisasi dan akses informasi.
 - Terbatasnya sinergi dengan mitra pembangunan seperti LSM, dunia usaha, dan perguruan tinggi.
- 5 Pelaksanaan Pembinaan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Meningkatnya potensi konflik sosial akibat perbedaan kepentingan di tingkat komunitas.
 - Kurangnya personel keamanan dan perlengkapan pendukung untuk memastikan ketertiban di wilayah terpencil.



6 Pelaksanaan Pembinaan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan

- Lambatnya pengembangan infrastruktur dasar yang mendukung aksesibilitas dan kegiatan ekonomi masyarakat.
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya lokal sebagai penggerak ekonomi wilayah.

7 Pelaksanaan Pembinaan di Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

- Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan, pendidikan, dan program sosial lainnya.
- Terbatasnya kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi permasalahan sosial, seperti kemiskinan dan pengangguran.

8 Pelaksanaan Penatausahaan Kecamatan

- Sistem administrasi yang masih manual dan kurang efisien, terutama dalam pengelolaan dokumen dan laporan.
- Minimnya pelatihan bagi staf administrasi untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan tata usaha modern.

Berikut adalah tabel pemetaan permasalahan yang memuat masalah pokok, masalah yang dihadapi, dan akar permasalahannya



**Tabel. 2.7 (Tabel. T-B.35.)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pelayanan Administrasi Publik	Kurangnya aksesibilitas layanan di wilayah perbatasan	Kondisi geografis yang masih belum terjangkau secara merata
		Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan	Sistem pelayanan belum sepenuhnya berbasis digital
		Ketidakcukupan fasilitas pendukung pelayanan	Keterbatasan anggaran untuk pengadaan fasilitas
2	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kurangnya kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan	Minimnya pelatihan dan pendampingan teknis bagi aparatur desa
		Koordinasi yang belum optimal antara kecamatan dan pemerintah desa	Kurangnya mekanisme komunikasi yang terstruktur dan efektif
3	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang belum merata	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran aktif dalam pembangunan
		Ketergantungan pada bantuan pemerintah dalam program pemberdayaan	Kurangnya diversifikasi sumber pendanaan atau kemandirian masyarakat dalam menjalankan program
4	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tantangan penegakan peraturan di wilayah terpencil	Jarak antarwilayah yang jauh menyulitkan pengawasan rutin
		Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat	Minimnya edukasi tentang hukum dan peraturan kepada masyarakat

Pemetaan ini menjadi langkah awal dalam menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung stabilitas sosial-politik di Kabupaten Kepulauan Anambas.



2.7 Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terpilih telah menetapkan visi dan misi periode lima kedepan 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi periode 2025-2029 yaitu :

***“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis,
Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan
Sejahterah”***

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dituangkan ke dalam empat (5) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Inovatif dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Agamis, Berbudaya dan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur
2. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Melalui Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan
3. Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi
4. Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim, Pariwisata untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
5. Meningkatkan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Kemiskinan.

Dari penjabaran visi dan misi serta program kerja unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Siantan Tengah terdapat pada Misi Ke-3 (ketiga) dan Ke-5 (Kelima) yaitu “Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi” dan “Meningkatkan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Kemiskinan”.



2.8 Renstra K/L dan Renstra

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Kecamatan Siantan Tengah yang akan dituangkan dalam Dokumen Renstra diharapkan dapat berkaitan dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga maupun instansi terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas agar pelaksanaan program dan kegiatan akan searah pada koridor yang benar. Untuk itu sangat perlu memperhatikan arah kebijakan Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, dengan dipandu Visi : Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Dengan uraian misi sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Dari penjabaran visi dan misi Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan Kecamatan Siantan Tengah melalui Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan umum, sasaran dan tujuan strategis yang dirumuskan sebagai berikut :



a. Tujuan Strategis

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

b. Sasaran Strategis

1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (a) Indeks Demokrasi Indonesia.
- (b) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu
- (c) Indeks Kinerja Ormas.

2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :

- (a) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
- (b) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
- (c) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
- (d) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.

3. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :

- (a) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
- (b) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
- (c) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.

4. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.



5. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
 6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
- c. Sasaran Strategis
1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (a) Indeks Demokrasi Indonesia.
 - (b) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu
 - (c) Indeks Kinerja Ormas.
 2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
 - (a) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - (b) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - (c) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - (d) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
 3. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
 - (a) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - (b) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - (c) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - (d) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
 4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian



Sasaran Strategis ini, meliputi :

- (a) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
- (b) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

2.9 Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043, pada pasal 6, Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah kepulauan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Berbasis Agromarinawisata, Minyak dan Gas serta Industri Ramah Lingkungan Berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas ke depan meliputi:

- a. batasan kondisi fisik dasar Wilayah (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan pulau-pulau kecil untuk pengembangan kegiatan;
- b. keterbatasan luas lahan Kawasan Budi Daya, yaitu 93% dari total luas Kepulauan Anambas merupakan Wilayah kelautan dan pulau-pulau kecil;
- c. Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada jalur ALKI II di Laut Cina Selatan sehingga mempunyai potensi ekspor hasil-hasil olahan laut yang besar; dan
- d. potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung Penataan Ruang Wilayah 20 tahun mendatang.

Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepulauan Anambas didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi pedoman utama dalam penataan ruang. RTRW bertujuan untuk mewujudkan wilayah kepulauan yang maju, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis agromarinawisata, minyak dan gas, serta industri



ramah lingkungan. Sebagai acuan, RTRW berfungsi untuk menyusun RDTR, perencanaan pembangunan jangka panjang, dan jangka menengah, serta menjadi dasar dalam pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan tata ruang.

Pengembangan tata ruang Kabupaten Kepulauan Anambas difokuskan pada sistem pusat permukiman yang terintegrasi dengan hierarki Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), serta Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Pengembangan sistem infrastruktur wilayah dilakukan secara terintegrasi, meliputi jaringan transportasi laut, darat dan udara, energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta fasilitas pendukung lainnya, guna meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

Pelestarian lingkungan menjadi prioritas utama dalam pembangunan, dengan fokus pada perlindungan kawasan lindung seperti hutan, daerah resapan air, dan ruang terbuka hijau. Upaya ini diwujudkan melalui pengendalian pemanfaatan ruang agar tidak melampaui daya dukung lingkungan serta pengembangan infrastruktur mitigasi bencana. Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan, pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab, termasuk melalui optimalisasi kawasan pesisir dan pulau kecil berbasis ekosistem, pengembangan energi terbarukan, dan penguatan kapasitas masyarakat lokal.

Dalam mendukung keberlanjutan pembangunan, pengembangan sektor ekonomi berbasis masyarakat menjadi salah satu fokus utama. Sektor kelautan, agribisnis, pariwisata, dan industri kecil menengah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan daya saing lokal. Selain itu, kawasan strategis, baik dari sudut pandang ekonomi, sosial, maupun lingkungan, akan dikembangkan secara optimal, dengan tetap mempertahankan keseimbangan fungsi pertahanan, keamanan, dan kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan.

Rencana pembangunan dilaksanakan dengan



mengedepankan prinsip sinergi antara kebijakan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan ruang sangat penting untuk menjamin keberhasilan program pembangunan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan, Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan mampu menjadi wilayah yang berdaya saing tinggi, sejahtera, dan berkelanjutan sesuai dengan RTRW tahun 2023–2043.

2.10 Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Siantan Tengah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui pelayanan publik yang berkualitas, pembinaan pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, terdapat berbagai tantangan yang memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang dapat menjadi fokus perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Kecamatan Siantan Tengah.

Isu strategis merupakan permasalahan mendasar yang memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Isu-isu strategis ini diidentifikasi berdasarkan analisis terhadap kondisi geografis, sosial, ekonomi, serta tantangan dan peluang yang ada. Berikut adalah isu-isu strategis Kecamatan Siantan Tengah:

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik, melalui pengembangan infrastruktur pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi.

2. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pemerintahan Desa

Meningkatkan kompetensi aparatur desa serta memperkuat sinergi antara pemerintah kecamatan dan desa untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.



3. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di wilayah kecamatan.

4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah.

a. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas. Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan.

b. Masih minimnya fasilitas yang ramah terhadap isu gender

c. Peningkatan pelayanan yang responsif terutama pada keadilan gender dan penyandang disabilitas

5. Peningkatan Ketertiban dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Memperkuat penegakan hukum dan ketertiban umum melalui edukasi masyarakat serta pengawasan yang lebih efektif, khususnya di wilayah-wilayah terpencil.

6. Mitigasi Risiko Perubahan Iklim Mengantisipasi dampak perubahan iklim, seperti kenaikan muka air laut dan abrasi, dengan



menyusun kebijakan adaptasi dan mitigasi yang melibatkan masyarakat lokal.

Isu-isu strategis ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Siantan Tengah. Dengan pendekatan yang terarah dan berbasis isu strategis, diharapkan program-program yang dirancang dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang berkualitas, Kecamatan Siantan Tengah menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta menghadapi tantangan yang ada. Tujuan-tujuan ini disusun berdasarkan analisis kondisi eksisting, potensi wilayah, dan visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas. Melalui pendekatan yang terukur dan strategis, tujuan dan sasaran ini menjadi panduan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja di tingkat kecamatan.

Penetapan sasaran yang terukur dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja yang relevan, mencakup berbagai aspek seperti kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, hingga pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran dapat dipantau secara sistematis, sekaligus menjadi dasar untuk mengevaluasi pencapaian yang telah diraih.

Melalui tabel berikut, disajikan rincian tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai setiap tahun selama periode 2025-2029. Rincian ini menjadi komitmen Kecamatan Siantan Tengah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan yang lebih baik, tata kelola pemerintahan yang efektif, dan pembangunan yang inklusif. Implementasi tujuan dan sasaran ini diharapkan dapat mendorong keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di wilayah Kecamatan Siantan Tengah.



Tabel. 3.1. (Tabel T-C.25.)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Siantan Tengah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Mewujudkan Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel		Predikat AKIP	B	B	BB	BB	BB	A	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas	Nilai AKIP	(60,10)	(63,15)	(67)	(69)	(71)	(71)	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Wiayah Kecamatan	70%	75%	80%	85%	90%	90%	



3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mendukung pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kecamatan Siantan Tengah menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaan program kerja selama periode 2025-2029. Tujuan dan sasaran dirancang untuk mencapai hasil yang konkret dan terukur, sementara strategi dan kebijakan menjadi panduan dalam pelaksanaan program serta alokasi sumber daya. Pendekatan ini bertujuan memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian hasil pembangunan yang sesuai dengan prioritas wilayah.

Strategi difokuskan pada upaya menyelesaikan permasalahan mendasar, memanfaatkan potensi, dan menangkap peluang pembangunan. Sementara itu, arah kebijakan ditetapkan untuk memberikan panduan teknis yang lebih spesifik dalam pelaksanaan strategi. Dengan sinergi antara tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan, Kecamatan Siantan Tengah berkomitmen untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya secara optimal. Berikut adalah tabel yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah disusun untuk jangka waktu 2025 hingga 2029:



Tabel. 3.2 (Table T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi :	Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahterah			
Misi :	3. Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi			
	5. Meningkatkan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Kemiskinan			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	- Penguatan sistem perencanaan berbasis kinerja.	- Penyusunan program kerja berbasis hasil (outcome-oriented).
			- Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis.	- Pengembangan kapasitas SDM yang berkelanjutan.
			- Optimalisasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).	- Implementasi standar operasional prosedur (SOP) dalam seluruh aktivitas organisasi.
			- Digitalisasi proses administrasi dan pelaporan kinerja.	- Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Meningkatnya fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah	- Perencanaan dan penjadwalan pembahasan Prolegda secara sistematis dan terukur.	- Penguatan koordinasi dengan DPRD dan perangkat daerah terkait untuk pembahasan rancangan peraturan daerah.
			- Peningkatan kompetensi staf dalam penyusunan naskah akademik dan legal drafting.	- Penyediaan tenaga ahli yang mendukung pembentukan produk hukum daerah.
			- Optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan agenda persidangan DPRD.	- Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan rapat dan pembahasan.
			- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rapat secara berkala untuk memastikan efisiensi dan efektivitas kerja.	- Penjaminan kualitas pelayanan persidangan dan administrasi melalui penerapan standar pelayanan minimal (SPM).

Tabel ini menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam upaya mencapai tujuan jangka menengah. Dengan arahan kebijakan yang jelas, diharapkan seluruh program yang dijalankan akan menghasilkan dampak positif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas.



BAB IV RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Untuk mencapai tujuan strategis dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Siantan Tengah menyusun rencana program dan kegiatan yang terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah. Program-program tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pengembangan infrastruktur dasar, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Kegiatan-kegiatan yang dirancang mencakup, antara lain, pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur, sosialisasi program pembangunan kepada masyarakat, pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di tingkat kecamatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan ini memerlukan dukungan pendanaan yang memadai, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, dana desa, serta potensi kemitraan dengan pihak swasta dan lembaga lainnya. Pendekatan efisiensi dan akuntabilitas akan diterapkan dalam pengelolaan pendanaan, dengan memastikan alokasi anggaran fokus pada kegiatan prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan pendanaan yang optimal, Kecamatan Siantan Tengah diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan..

Berikut adalah daftar program- program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas selama lima tahun mendatang:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Mendukung administrasi umum pemerintahan, seperti pengelolaan aset dan keuangan kecamatan.
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi pelayanan dan peningkatan kapasitas aparatur.



2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelatihan dan pendampingan.

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Menguatkan koordinasi dengan aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga ketentraman wilayah.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Memastikan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan melalui pembenahan tata kelola administrasi.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Menguatkan tata kelola desa melalui pelatihan aparatur dan supervisi rutin.

Rencana program dan kegiatan ini akan dilaksanakan secara terstruktur dengan alokasi pendanaan yang optimal. Pendanaan indikatif disajikan secara lengkap pada tabel 4.1 (Tabel T-C.27.)



Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan Siantan Tengah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN													
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I	1. Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				3,163,630,607		3,786,022,134		3,972,508,277		4,070,610,509		4,226,530,509		4,281,400,509		
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	76,69%		76,69%		76,82%		77,45%		77,75%		77,90%			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tahunan Perangkat Daerah	13 Dok	13 Dok	24,794,200	13 Dok	8,385,000	13 Dok	9,885,000	13 Dok	38,724,200	13 Dok	38,724,200	13 Dok	38,724,200	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	4 Dok	5,085,000	4 Dok	3,105,000	4 Dok	3,105,000	4 Dok	6,690,000	4 Dok	6,690,000	4 Dok	6,690,000
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	3,390,000	1 Dok	-	1 Dok	1,000,000	1 Dok	5,530,000	1 Dok	5,530,000	1 Dok	5,530,000
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	2,140,000	1 Dok	1,070,000	1 Dok	1,070,000	1 Dok	4,280,000	1 Dok	4,280,000	1 Dok	4,280,000
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	7,019,600	1 Dok	1,070,000	1 Dok	1,070,000	1 Dok	8,624,600	1 Dok	8,624,600	1 Dok	8,624,600



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	2,579,600	1 Dok	2,140,000	1 Dok	2,140,000	1 Dok	7,019,600	1 Dok	7,019,600	1 Dok	7,019,600
	6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	1 Lap	3,580,000	1 Lap	-	1 Lap	500,000	1 Lap	5,580,000	1 Lap	5,580,000	1 Lap	5,580,000
	7	Walidata pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Lap	1 Lap	500,000	1 Lap	500,000	1 Lap	500,000	1 Lap	500,000	1 Lap	500,000	1 Lap	500,000
	8	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1 Lap	1 Lap	500,000	1 Lap	500,000	1 Lap	500,000	1 Lap	500,000	1 Lap	500,000	1 Lap	500,000
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	2,794,203,573	100%	3,641,331,809	100%	3,731,887,809	100%	3,809,687,809	100%	3,959,887,809	100%	4,029,887,809
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Org/Bn	48 Org/Bn	2,684,547,573	48 Org/Bn	3,582,231,809	48 Org/Bn	3,622,231,809	48 Org/Bn	3,700,031,809	48 Org/Bn	3,850,231,809	48 Org/Bn	3,920,231,809
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	1 Dok	109,656,000	1 Dok	59,100,000	1 Dok	109,656,000	1 Dok	109,656,000	1 Dok	109,656,000	1 Dok	109,656,000
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	61,472,190	100%	-	100%	5,000,000	100%	6,000,000	100%	4,000,000	100%	5,000,000
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Pkt	3 Pkt	61,472,190	3 Pkt	-	3 Pkt	-	3 Pkt	-	3 Pkt	-	3 Pkt	-
	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Org	3 Org	-	3 Org	-	3 Org	5,000,000	3 Org	6,000,000	3 Org	4,000,000	3 Org	5,000,000
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	156,949,691	100%	100,115,135	100%	140,465,468	100%	134,418,500	100%	125,918,500	100%	122,418,500
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Pkt	5 Pkt	7,046,968	5 Pkt	5,608,369	5 Pkt	7,046,968	5 Pkt	5,000,000	5 Pkt	3,500,000	5 Pkt	2,000,000



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 PPkt	54,155,900	4 PPkt	38,360,986	4 PPkt	40,000,000	4 PPkt	44,000,000	4 PPkt	30,000,000	4 PPkt	44,000,000	
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Pkt	8,427,598	3 Pkt	3,211,950	3 Pkt	13,018,500	3 Pkt	13,018,500	3 Pkt	13,018,500	3 Pkt	13,018,500	
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Pkt	10,118,430	3 Pkt	6,068,830	3 Pkt	8,000,000	3 Pkt	5,000,000	3 Pkt	7,000,000	3 Pkt	1,000,000	
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Pkt	-	2 Pkt	-	2 Pkt	7,400,000	2 Pkt	7,400,000	2 Pkt	7,400,000	2 Pkt	7,400,000	
	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lap	32,240,795	1 Lap	12,475,000	1 Lap	25,000,000	1 Lap	10,000,000	1 Lap	15,000,000	1 Lap	10,000,000	
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Lap	44,960,000	2 Lap	34,390,000	2 Lap	40,000,000	2 Lap	50,000,000	2 Lap	50,000,000	2 Lap	45,000,000	
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	58,608,753	100%	18,212,600	100%	40,000,000	100%	30,000,000	100%	40,000,000	100%	33,000,000
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	39,395,923	5 Unit	18,212,600	5 Unit	40,000,000	5 Unit	30,000,000	5 Unit	40,000,000	5 Unit	33,000,000	
	2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	19,212,830	2 Unit	-	2 Unit	-	2 Unit	-	2 Unit	-	2 Unit	-	
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	46,452,200	100%	-	100%	24,120,000	100%	30,000,000	100%	35,000,000	100%	30,000,000
	1	Penyediaan Jasa pelayanan Umum dan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum dan Kantor	2 Lap	20,000,000	2 Lap	-	2 Lap	-	2 Lap	-	2 Lap	-	2 Lap	-	
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Lap	26,452,200	2 Lap	-	2 Lap	24,120,000	2 Lap	30,000,000	2 Lap	35,000,000	2 Lap	30,000,000	
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	21,150,000	100%	17,977,590	100%	21,150,000	100%	21,780,000	100%	23,000,000	100%	22,370,000

**RANCANGAN AKHIR RENSTRA
KECAMATAN SIANTAN TENGAH**



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Urusan Pemerintah Daerah		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	9,780,000	6 Unit	6,487,590	6 Unit	9,780,000	6 Unit	9,780,000	6 Unit	10,000,000	6 Unit	11,000,000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	11,370,000	6 Unit	11,490,000	6 Unit	11,370,000	6 Unit	12,000,000	6 Unit	13,000,000	6 Unit	11,370,000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	-	6 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	80%	80%	-	80%	-	80%	25,000,000	80%	30,000,000	80%	39,950,000	80%	40,000,000
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	70%	70%	-	70%	-	70%	25,000,000	70%	30,000,000	70%	39,950,000	70%	40,000,000
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Lap	1 Lap	-	1 Lap	-	1 Lap	25,000,000	1 Lap	30,000,000	1 Lap	39,950,000	1 Lap	40,000,000
II I PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PERSENTASE FASILITASI PENATAAN DESA	90%	90%	303,040,500	90%	110,574,206	90%	285,225,000	90%	250,225,000	90%	225,000,000	90%	260,225,000
1	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	90%	90%	303,040,500	90%	110,574,206	90%	285,225,000	90%	250,225,000	90%	225,000,000	90%	260,225,000
1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	6 Lembaga	6 Lap	198,040,500	6 Lap	110,574,206	6 Lap	235,225,000	6 Lap	235,225,000	6 Lap	200,000,000	6 Lap	235,225,000
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	105,000,000	1 Unit	-	1 Unit	50,000,000	1 Unit	15,000,000	1 Unit	25,000,000	1 Unit	25,000,000



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

I	V	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		PERSENTASE PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	90%	90%	9,576,000	90%	13,800,000	90%	32,350,000	90%	30,000,000	90%	25,000,000	90%	30,000,000
	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90%	90%	9,576,000	90%	13,800,000	90%	32,350,000	90%	30,000,000	90%	25,000,000	90%	30,000,000
		1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Lap.	1 Lap.	9,576,000	1 Lap.	13,800,000	1 Lap.	32,350,000	1 Lap.	30,000,000	1 Lap.	25,000,000	1 Lap.	30,000,000
V		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	81%	82%	113,913,282	83%	83,103,221	85%	120,000,000	87%	100,000,000	88%	85,000,000	89%	150,000,000
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	81%	82%	113,913,282	83%	83,103,221	85%	120,000,000	87%	100,000,000	88%	85,000,000	89%	150,000,000
		1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	300 Org	300 Org	113,913,282	300 Org	83,103,221	300 Org	120,000,000	300 Org	100,000,000	300 Org	85,000,000	300 Org	150,000,000
V	I	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		PERSENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	68%	69%	63,586,450	70%	6,900,000	73%	14,026,950	78%	8,400,000	85%	25,000,000	87%	10,526,950
	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	68%	69%	63,586,450	70%	6,900,000	73%	14,026,950	78%	8,400,000	85%	25,000,000	87%	10,526,950
		1	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dok	1 Dok	14,026,950	1 Dok	6,900,000	1 Dok	14,026,950	1 Dok	6,900,000	1 Dok	15,000,000	1 Dok	10,526,950



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

	2	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Lap.	1 Lap.	49,559,500	1 Lap.	-	1 Lap.	-	1 Lap.	1,500,000	1 Lap.	10,000,000	1 Lap.	-
Jumlah Pendanaan :						3,653,746,839		4,000,399,561		4,449,110,227		4,489,235,509		4,626,480,509		4,772,152,459



Tabel 4.5 Tabel T-C.28)
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Predikat SAKIP	Predikat	B	B	BB	BB	BB	A	Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Permendagri No 104 tahun 2016
2	Nilai SAKIP	Nilai	60,10	63,15	67	69	71	71	
3	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Wiayah Kecamatan	Persentase	70,00	70,50	80	80,50	90,00	90,50	

Tabel 4.6 (Tabel T-C.28)
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah



mengacu pada Tujuan dan Sasaran

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai SAKIP	Baik	60,10	63,15	67	69	71	71	Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Permendagri No 104 tahun 2016
2	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Wiayah Kecamatan	Baik	70	75	80	85	90	90	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	76,69	76,69	76,82	77,45	77,75	77,90	



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen penting yang menjadi pedoman dalam menyusun dan melaksanakan berbagai kebijakan serta program pembangunan di tingkat kecamatan. Dengan visi yang jelas dan tujuan yang terarah, rencana ini diharapkan dapat menjawab tantangan yang dihadapi, memaksimalkan potensi yang ada, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan dalam menjalankan rencana ini sangat bergantung pada kolaborasi antara aparat kecamatan, pemerintah daerah, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Oleh karena itu, implementasi yang efektif dan efisien menjadi kunci utama dalam mencapai hasil yang diharapkan.

Dengan demikian, melalui perencanaan yang matang, pengelolaan sumber daya yang optimal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, Kecamatan Siantan Tengah diharapkan dapat terus berkembang menjadi wilayah yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Semua pihak diharapkan dapat bersinergi untuk mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Semoga dokumen ini menjadi landasan yang kokoh untuk mengarahkan kebijakan dan program-program yang membawa perubahan positif bagi masyarakat Kecamatan Siantan Tengah di masa depan.

Air Asuk, 12 Setember 2025

CAMAT SIANTAN TENGAH,



AFRIZAL S.Pd

Penata TR. I / III.d

NIP. 19680217 199303 1 005